

CIAMIS ATAU GALUH

MAKALAH

Disusun dalam rangka Seminar Sejarah bertema
“Menelusuri Nama Daerah Galuh dan Ciamis; Tuntutan dan Harapan”
Diselenggarakan pada 12 September 2012 di Padepokan Rengganis
Kabupaten Ciamis

Oleh:

Mumuh Muhsin Z.



**FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR
2012**

CIAMIS ATAU GALUH?¹

oleh:

Mumuh Muhsin Z.²

ABSTRAK

Nama yang sangat menyejarah wilayah ini adalah Galuh. Galuh merupakan nama kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda Galuh (baca: Kerajaan Sunda yang beribu kota di Galuh), kemudian menjadi nama Kabupaten. Melekat makna pada nama “galuh” sejumlah muatan filosofis, historis, dan emosional yang positif. Pada dekade pertama abad ke-20 nama Galuh diubah menjadi Ciamis. Menurut pendapat sebagian orang, makna yang terkandung pada kata “ciamis” sangat bertolak belakang secara diametris dengan makna “galuh”. Oleh karena itu muncul wacana mengubah kembali nama Ciamis menjadi Galuh.

Pendahuluan

*“What’s in a name? That which we call a rose;
by any other name would smell as sweet”*
(William Shakespeare)

“Apa arti sebuah nama? Setangkai bunga ros, disebut apa pun tetap akan berbau harum”, demikian kata William Shakespeare. Tidak ada yang salah dengan pemikiran Shakespeare seperti itu, apalagi bila yang menjadi objek penamaan itu adalah sebuah benda mati, setangkai bunga, yang memiliki hukum alamiah tetap (*sunnatullah*)-nya sendiri.

Ada sebagian orang yang menganalogikan persoalan nama “Galuh atau Ciamis” itu dengan kasus nama “bunga ros” itu sehingga bersikap apatis dan dengan enteng berkomentar “tidak peduli nama apa pun yang akan diberikan pada kabupaten paling selatan Jawa Barat ini”.

¹ Makalah disusun dalam rangka Seminar Sejarah bertema “Menelusuri Nama Daerah Galuh dan Ciamis; Tuntutan dan Harapan” diselenggarakan pada 12 September 2012 di Padepokan Rengganis Kabupaten Ciamis.

² Pengajar pada Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran Bandung.

Yang menarik untuk didiskusikan adalah bukan sekedar mengapa akhir-akhir ini muncul wacana penggantian nama kabupaten dari Ciamis ke Galuh tapi juga mengapa pada tahun tahun 1916, Bupati R.A.A. Sastrawinata (1914-1936) mengganti nama kabupaten menjadi Kabupaten Ciamis padahal nama Galuh sendiri sudah muncul sebagai nama kerajaan pada awal abad ke-7 dan menjadi nama kabupaten sejak awal abad ke-17?

Dari sekian sumber yang diperoleh tidak ditemukan penjelasan mengapa atau apa yang menjadi alasan Bupati R.A.A. Sastrawinata mengganti nama Galuh menjadi Ciamis. Oleh karena itu muncul penafsiran negatif bahwa Bupati R.A.A. Sastrawinata ingin memutuskan matarantai kesinambungan (kontinuitas) sejarah. Mengapa?

Toponimi Ciamis dan Galuh

Munculnya gugatan terhadap penggantian nama Galuh menjadi Ciamis (1916) bisa jadi berawal dari pengkajian toponimi. Secara toponimis, tidak ditemukan makna yang membanggakan di balik kata “ciamis”.

Kata Ciamis berasal dari “*ci*” dan “*amis*”. Kata “*ci*” singkatan dari *cai* yang berarti air. Kata “*amis*” punya dua arti. Pertama *amis* (bhs. Sunda) berarti manis (berkait dengan rasa). Kedua *amis* (bhs. Jawa) berarti anyir (berkait dengan aroma penciuman). Malah Danadibrata (2009: 19, 420) mengartikan kata “*amis*” sebagai “*bau mabek, bau pisan*” (bau sekali, sangat bau). Namun, Hardjasaputra (t.th.: 4) berpendapat bahwa kata “*amis*” dalam Ciamis, bukan “*amis*” dalam bahasa Sunda yang berarti rasa manis. Sumber tradisional yang memuat data Kerajaan Galuh menunjukkan bahwa “*amis*” dalam nama Ciamis adalah “*amis*” dalam bahasa Jawa yang berarti “*anyir*” itu.

Sebutan “*anyir*” itu berkaitan dengan tragedi berdarah. Setidaknya ada tiga momentum peristiwa berdarah yang berkait dengan sejarah (Sunda) Galuh. Pertama adalah peristiwa Perang Bubat (1357). Kedua, pada akhir abad ke-16 M. Kerajaan Mataram berupaya menguasai Kerajaan Galuh. Terjadilah konflik antara

kedua belah pihak, sehingga di beberapa daerah Galuh terjadi tragedi “banjir darah”. Tahun 1595 Kerajaan Galuh jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Ketiga, ketika Galuh jatuh ke dalam kekuasaan Kompeni (mulai akhir tahun 1705), terjadi lagi tragedi berdarah di Ciancang (Utama) tahun 1739 yang dikenal dengan sebutan “Bedah Ciancang” (Hardjasaputra, t.th: 2).

Dengan demikian, kata “*amis*” dalam Ciamis lebih tertuju pada arti bau amis darah manusia, korban dalam tragedi. Katanya, sebutan “*amis*” yang ditujukan pada darah manusia itu dilontarkan oleh utusan penguasa Mataram ketika mengontrol daerah Galuh tidak lama setelah di Galuh terjadi tragedi “banjir darah”. Oleh karena itu, sebutan “*ciamis*” pada awalnya lebih merupakan cemoohan dari pihak Mataram terhadap pihak Galuh.

Adapun kata “*galuh*” secara bahasa mengandung tiga makna. Pertama, kata *galuh* (bhs. Sanskerta; *galu*) berarti “permata yang paling baik”. Kedua, kata *galuh* (bhs. Sanskerta) berasal dari kata *aga* berarti “gunung” dan *lwah* berarti “bengawan, sungai, laut” (Danadibrata, 2009: 203). Ketiga, kata *galuh* sering dimaknai sebagai *galeuh* (bhs. Sunda) yang berarti “*bagian di jero tangkal kai nu pang teuasna*” (Danadibrata, 2009: 202). Arti-arti kata tersebut jelas sangat simbolis dan sarat muatan makna yang sangat dalam.

Selanjutnya, nama *galuh* pun mengacu pada nama kerajaan dan nama kabupaten. Nama “galuh” muncul dalam panggung sejarah sejak berdirinya Kerajaan Galuh. Kerajaan ini didirikan oleh seorang tokoh Sunda bernama Wretikandayun pada awal abad ke-7 M. Wretikandayun semula berkuasa di daerah Kendan (Kendan termasuk wilayah kekuasaan Kerajaan Tarumanagara). Sejak awal abad ke-7 pamor kerajaan itu makin memudar, terutama masa pemerintahan Raja Tarusbawa (raja Tarumanagara terakhir, 669-670 M.). Kondisi itu dimanfaatkan oleh Wretikandayun untuk melepaskan Kendan dari kekuasaan Tarumanagara. Upaya Wretikandayun berhasil tanpa menimbulkan konflik dengan penguasa Tarumanagara. Oleh karena Kendan tidak memadai sebagai pusat pemerintahan, maka Wretikandayun memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Karangamulyan sekarang. Daerah itu dibangun menjadi pusat

Kerajaan Galuh. Sementara itu, Tarusbawa mendirikan Kerajaan Sunda sebagai kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara.

Kemudian terjadi perundingan antara Wretikandayun dengan Tarusbawa mengenai wilayah kekuasaan masing-masing. Perundingan sampai pada kesepakatan bahwa sungai Citarum menjadi batas wilayah kedua kerajaan. Daerah sebelah barat Citarum menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda, dan daerah sebelah timur Citarum menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Galuh.

Ketika Kerajaan Galuh diperintah oleh Sanjaya (723-732 M.), sang raja menjadi menantu Raja Sunda Tarusbawa. Hal itu menyebabkan terjadinya penggabungan kedua kerajaan menjadi Kerajaan Sunda-Galuh, sehingga Kerajaan Galuh makin berkembang. Pada abad ke-13, Kerajaan Galuh berpusat di Kawali. Kerajaan Galuh mencapai kejayaan terutama pada masa pemerintahan Maharaja Niskala Wastu Kencana (1371-1475 M.).

Pada akhir abad ke-16 M. Kerajaan Mataram berupaya untuk menguasai Kerajaan Galuh. Tahun 1595 Kerajaan Galuh jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Mataram. Pada awal pemerintahan Sultan Agung sebagai raja Mataram (1613), status Kerajaan Galuh diubah menjadi setingkat dengan kabupaten. Hal itu ditandai oleh pengangkatan Adipati Panaekan menjadi Wedana Mataram di Galuh.

Pada zaman penjajahan Belanda pangkat wedana setingkat dengan bupati. Dengan demikian, sejak awal abad ke-17 itulah, Galuh menjadi kabupaten, Kabupaten Galuh, dengan bupati pertama Adipati Panaekan.

Kabupaten Galuh pernah mengalami perpindahan ibukota beberapa kali, yaitu dari Panaekan ke Gara Tengah (Cineam), kemudian pindah lagi ke Barunay (Imbanagara). Pemindahan ibukota Kabupaten Galuh dari Gara Tengah ke Barunay terjadi tanggal 12 Juni 1642 M. (14 *Mulud* tahun *Hé*).

Pada awal abad ke-19 ibukota Kabupaten Galuh dipindahkan lagi ke Cibatu, kemudian ke Burung Diuk. Setelah kota Ciamis berdiri, ibu kota Kabupaten Galuh dipindahkan ke kota Ciamis (masa pemerintahan Bupati Wiradikusumah, 1815-1819).

Respons Masyarakat

Wacana kembalinya nama Kabupaten Ciamis ke Kabupten Galuh terus mendapat respons dari berbagai kalangan seperti politisi, LSM, sastrawan, dan sejarawan. Mereka banyak yang sepakat inilah saatnya mengubah sejarah yang akan dikenang oleh masyarakat.

Sastrawan Godi Suarna menegaskan “sudah saatnya nama Kabupaten Ciamis dikembalikan ke Kabupaten Ciamis. Karena perasaan orang Ciamis sebagai orang Galuh sangat kuat. ‘Nasionalisme’ kegaluhannya orang Ciamis sangat kuat.” Mengenai ketakutan *cost* pengembalian nama kabupaten terlalu besar, menurut Godi, “itu hanya bagi orang-orang yang berpikiran kerdil. Mengubah nama itu tidak mudah, namun bagi orang-orang ‘besar’ itu bisa dilakukan”. “Hanya orang-orang besar yang akan mampu mengubah sejarah, termasuk mengembalikan nama Ciamis ke Galuh. Perlu diingat, nama Galuh itu hasil bertapa susah payah para pendahulu kita, kok seenaknya diubah menjadi Ciamis tanpa asal usul” (“Kabupaten Ciamis Jadi..., 2010).

Prof. Nina Herlina Lubis, sejarawan, berpendapat bahwa “penggantian nama Kabupaten Galuh menjadi Ciamis oleh Bupati R.A. Sastrawinta (1914-1936) kental muatan politik. R.A. Sastrawinta yang ditunjuk Belanda menjadi Bupati Ciamis itu berasal dari Karawang yang tidak memahami dan mengenal lebih dalam sejarah Galuh. Perubahan nama Galuh ke Ciamis yang mengandung arti anyir berarti menghina masyarakat galuh”. Ditambahkan Nina, “Kerajaan Galuh sudah berdirisejak abad VIII Masehi sesuai Prasasti Canggal (732 M). Sementara Kerajaan Galuh di Kawali dengan Rajanya Prabu Maharaja tercatat pada 1350, dan menjadi kabupaten dengan ibukotanya Ciamis terjadi pada 15 Januari 1915 dengan bupatinya R. Wiradikusumah. Banyak peninggalan Kerajaan Galuh yang masih terawat di Ciamis, di antaranya situs Astana Gede Kawali, situs Susuru Kertabumi, situs Karangkamulyan, dan banyak lagi. Kalau kita sudah tahu

sejarah Galuh pasti menginginkan penggantian nama Ciamis ke Galuh” (“Kabupaten Ciamis Jadi..., 2010).

Sekretaris Lapkesdam NU Ciamis, Maulana Sidik, berharap “Pemkab dan DPRD Ciamis secepatnya memulai proses pergantian nama kabupaten tersebut dengan membuat tim. Menurutnya, wacana perubahan nama itu sudah lama, namun karena dianggap pemborosan APBD sehingga terkesan diacuhkan. Padahal kata Sidik, dalam tradisi masyarakat kita, nama menjadi sebuah pengharapan (*tafa'ul*) atas seluruh kebaikan. Perubahan nama Ciamis menjadi Kabupaten Galuh harus dianggap sebagai sebuah harapan yang memberikan dampak psikologis terhadap kesejahteraan dan keadilan masyarakatnya. Tidak boleh dilupakan bahwa citra diri dalam cerminan jati diri lebih mahal dari apa pun” (“Kabupaten Ciamis Jadi..., 2010).

Ketua Komisi IV DPRD Ciamis, Hendra S. Marcusi mengatakan, “secara pribadi sepakat dengan pengembalian nama Kabupaten Ciamis ke Galuh. Nama Kabupaten Galuh akan mempertegas identitas dan memberikan spirit besar bagi masyarakat kabupaten Ciamis” (“Kabupaten Ciamis Jadi..., 2010).

Respons berbeda disampaikan oleh Ketua DPRD Ciamis, Asep Roni yang disampaikan pada Rabu, 21 Juli 2010. Dia mengatakan:

“saya tidak setuju (perubahan nama Ciamis menjadi Galuh) karena biayanya mahal. Selain itu juga tidak ada jaminan dengan berubahnya nama rakyat akan semakin sejahtera. Akan lebih baik biayanya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat” (“Pro Kontra Nama ...”, 2010).

Selanjutnya dia menyatakan:

Mengenang kejayaan masa lampau merupakan hal yang baik, tetapi tidak harus terbawa pada romantisme sejarah. Spirit Galuh tidak hanya dari nama, tetapi bagaimana berbuat yang lebih baik untuk masyarakat. Tidak ada artinya apabila nama berubah, tetapi tidak ada dampak positifnya bagi rakyat Ciamis. ... Perubahan tersebut bukan persoalan yang mudah, sebab harus melalui proses dan mekanisme panjang. Termasuk melakukan perubahan terhadap undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Ciamis. Belum lagi harus dilakukan penyesuaian dalam semua bidang pemerintahan dan kemasyarakatan. Perubahan stempel, kop surat Ciamis, papan nama dan lainnya butuh biaya sangat besar (“Pro Kontra Nama ...”, 2010).

Tentu saja pendapat-pendapat di atas belum merepresentasikan kehendak masyarakat Ciamis. Akan tetapi, sebagai tahap awal hal tersebut cukup bermanfaat dan sangat ilustratif untuk memetakan respons masyarakat yang lebih luas pada masa mendatang.

Simpulan

Perubahan nama sesungguhnya bukan hal yang tabu. Bagi kita, nama tidak lepas dari idealisasi simbol yang sarat kandungan makna-makna kebaikan, harapan, doa, dan harus sangat referensial. Bila dikaitkan dengan pilihan nama “Ciamis” atau “Galuh”, tentu saja nama Galuh lebih mendekati idealisasi itu.

Namun demikian, harus menjadi pemikiran bersama bagaimana caranya supaya “*caina herang laukna beunang*”. Penetapan mekanisme yang disepakati untuk pengambilan keputusan perlu didahulukan mendiskusikannya. Musyawarah-mufakat tampaknya warisan nilai yang masih tetap aktual untuk diamalkan menghadapi persoalan ini. Pertimbangan pertimbangan antara besaran manfaat dan madarat pun perlu untuk jadi bahan pertimbangan.

Daftar Sumber

Danadibrata, R.A. 2009.

Kamus Bahasa Sunda. Bandung: Kiblat Buku Utama.

Hardjasaputra, A. Sobana. t. th.

Ciamis Kembalikan Lagi ke Galuh. Makalah.

..... t.th.

“Ciamis Pulangkeun Deui ka Galuh”, *Galura*, November 2003 dan *Cupumanik*, No. 8 Th I, Maret 2004.

“Kabupaten Ciamis Jadi Kabupaten Galuh”, <http://kabar-ciamis.blogspot.com/2010/07/> (9 September 2012).

“Pro Kontra Nama Kabupaten Galuh”, *Pikiran Rakyat* 22/07/2010 terbaca dalam
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/118283> (9 September 2012).